

BAB I

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulisan yang berjudul Sikap Indonesia Terhadap Pernyataan Kemerdekaan Kosovo ini adalah suatu upaya dari penulis untuk melihat bagaimana Negara Indonesia yang jika dilihat dari penduduknya mayoritas beragama Islam dan merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia masih belum mengambil sikap mendukung atau menolak kemerdekaan Kosovo. Dimana pada umumnya banyak negara internasional yang mayoritas penduduknya bukan muslim mengambil keputusan untuk menyetujui kemerdekaan Kosovo secara sepihak seperti negara besar Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa yaitu Perancis, Inggris, Italy dan Australia yang langsung bersedia untuk menjadi rekan diplomatik dengan negara baru merdeka itu.

Negara-negara tersebut mendukung kemerdekaan Kosovo dengan alasan, karena banyak pelanggaran HAM seperti pembersihan etnis Albania yang dipimpin langsung oleh Presiden Serbia yaitu Slobodan Milosevic terhadap warga Kosovo. Sementara Negara-negara yang tidak mendukung secara tegas menolak kemerdekaan Kosovo yaitu negara induknya Serbia menganggap kemerdekaan tersebut adalah separatisme karena memisahkan diri secara sepihak tanpa persetujuan dari negara induknya, selain itu Rusia juga secara terang-terangan menolak kemerdekaan Kosovo yang menganggap penggrogotan wilayahnya.

Disisi lain Indonesia melihat Kemerdekaan Kosovo merupakan kemerdekaan Unilateral, yang bisa menjadi preseden dan memicu munculnya separatisme di dalam negerinya mislanya Papua dan Aceh pada khususnya dan negara-negara lain pada umumnya. Seperti permasalahan terakhir separatisme yang baru saja selesai yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan separatisme di Papua. Kemudian Timor-timur yang mengalami permasalahan yang sama akhirnya bisa melepaskan diri dari Indonesia. Hal itu membuat khawatir pemerintah apabila menyetujui maka takut bagian negara akan timbul keinginan yang sama melihat pemisahan Kosovo dari negara pusatnya.

Di satu sisi Indonesia ingin mendukung kemerdekaan Kosovo. Karena banyak pembantaian warga muslim di sana untuk lepas dari Serbia. Tapi disisi lain, pemerintah Indonesia khawatir timbul separatisme di dalam negara bagiannya. Dan Indonesia memikirkan untung ruginya apabaila hubungan kerjasama yang sudah terjalin cukup lama dengan negara yang mendukung maupun menolak kemerdekaan Kosovo akan renggang. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih jauh kedalam permasalahan dilema bagi pemerintah Indonesia. Karena pemerintah masih sangat hati-hati dalam mengambil sikap dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan.

Sampai sekarang pemerintah Indonesia belum berada pada posisi untuk memberikan pengakuan atas pernyataan kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena Indonesia yang notabennya

kemerdekaan penduduk Kosovo yang sebagaimana warganya mayoritas 90% muslim sama seperti Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Percaturan di panggung internasional dimarakkan lahirnya negara baru di wilayah Balkan. Kosovo adalah Sebuah provinsi negara bekas Yugoslavia di sebelah tenggara Eropa yang sebelumnya di bawah kedaulatan Serbia,¹ Selama ini memang terus berjuang untuk memisahkan diri dari Serbia yang akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 february yang lalu dengan di tanda tangani oleh Presiden Kosovo Fatmir Sejdiu, Perdana Menteri Hashim Thaci, serta juru bicara parlemen Kosovo Jakup Krasniqi. Kemerdekaan Kosovo mendapat masalah ketika Negara induknya tidak menyetujui deklarasi tersebut. Sehingga Kemerdekaan tersebut menjadi kotnroversial bagi Negara-negara dunia.

Kosovo merupakan Negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang dulunya salah satu provinsi negara Serbia, hasil pecahan Yugoslavia. Kosovo selama bertahun-tahun merasa hidup tertekan di bawah rezim otoriter Serbia, dan karena itu menuntut kemerdekaan yang akhirnya bisa memerdekakan diri. Pada waktu itu, Kosovo diberi otonomi khusus oleh pemerintah Serbia atas tekanan-tekanan dari negara-negara barat dan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Kosovo yang merupakan Provinsi Yugoslavia/Serbia itu berpenduduk 2,1 juta, terdiri dari 90 persen etnis Albania yang Muslim 5,3 persen etnis Serbia

¹ *Wawancara* Kosovo (dilakukan pada tanggal 15 Maret 2008). Sumber: <http://wikimedia.org/id>

yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis Bosnia dan minoritas.²

Ratusan tahun yang lalu sebenarnya etnik Albania merupakan masyarakat yang paling sedikit atau minoritas dibandingkan dengan suku lainnya seperti etnik Serbia yang justru dulunya merupakan mayoritas sekarang malah sebaliknya menjadi minoritas di Kosovo. Karena pada saat masih dibawah kekuasaan Yugoslavia sampai tahun 1386 kerajaan Ottoman yang berpusat di Istanbul Turki memasuki wilayah Kosovo dan bisa menaklukan wilayah ini.³ Setelah masuknya kerajaan Ottoman yang membawa ajaran agama Islam maka banyak penduduk Kosovo yang mayoritas etnik Balkan masuk Islam yang semula Kristen Ortodok kemudian berangsur-angsur beralih memeluk Islam yang dibawakan oleh kekaisaran Ottoman.⁴

Karena ajaran Islam membawakan kedamaian tersendiri dari kehidupan sehari-hari warga Albania. Masuknya Islam di Kosovo lebih disebabkan faktor agama Islam itu sendiri yang mempunyai kedalaman spiritualitas. Islam akhirnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pola hidup masyarakat Kosovo, seperti sistem keluarga, persaudaraan, dan tata cara bersosialisasi. Masa pemerintahan Ottoman pada tahun 1389 merupakan masa keemasan Islam di Kosovo. Sejarah mencatat, etnik Balkan di Kosovo adalah penganut Islam yang pertama di kawasan tersebut.

Selama bertahun-tahun Kosovo di pegang oleh kekaisaran Istanbul sampai akhirnya terjadi pertempuran Balkan antara 1912 sampai 1913 yang

² *Kosovo merdeka hak atau separatisme-1010*. (diakses pada tanggal 31 maret 2008): Sumber <http://2tech.biz/opini/luar-negeri>

³ *Sejarah panjang kemerdekaan Kosovo*, (Akses pada tanggal 2 april 2008): Sumber <http://isnanto.multiply.com>.

berlangsung sebanyak 2 kali.⁵ Pasukan Serbia yang bersekutu dengan beberapa negara tetangganya seperti Bulgaria, Yunani, Serbia dan Montenegro berhasil memukul mundur pasukan Ottoman yang memang kala itu sedang mengalami kemunduran. Pada akhirnya kerajaan Ottoman menyerah begitu saja walaupun ada perlawanan yang begitu dahsyat masih tetap kalah. karena tidak bisa membendung pasukan Serbia dan sekutunya yang cukup besar. Secara tidak langsung wilayah Kosovo direbut kembali oleh Serbia yang menandakan awal kegelapan bagi warga Kosovo tersendiri. karena penindasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap etnik Albania telah di mulai lagi. Hasil dari peperangan itu adalah disetujuinya perjanjian London dan Perjanjian Bukares.

Bertahun-tahun kosovo kembali ke Yugoslavia yang didominasi oleh etnik Serbia meski sebagai wilayah otonomi khusus, hingga akhirnya Yugoslavia yang merupakan negara federal runtuh. Mengakibatkan beberapa negara bagiannya melepaskan diri. Seperti Slovenia dan Kroasia memerdekakan diri pada tahun 1991, yang kemudian disusul dengan intervensi militer dari tentara federal yang tidak menyetujui kemerdekaan kedua wilayah tersebut, pertempuran sengit diwilayah Kroasia yang jumlah penduduk etnik Serbia cukup banyak, selain itu pengaruh ingatan akan perang dunia kedua.

Pada tahun 1992 Bosnia-Herzegovina menyusul memproklamkan kemerdekaannya, pada waktu itu juga tentara federal melakukan aksi militer dengan alasan memertahankan kesatuan negaranya. Pertempuran di Bosnia

terjadi begitu sengit dan cukup lama hingga disetujuinya perjanjian Dayton pada tahun 1995.⁶

Pada tahun 1999 pecah Perang di Kosovo, perang ini dilatar belakangi oleh referendum rakyat Kosovo yang mayoritas menginginkan kemerdekaan dari Serbia, Karena selama bertahun-tahun etnis Albania merasa didiskriminasikan pemerintah Serbia di Belgrade, menjadi sasaran kekerasan dan tindakan represif. sementara pemerintahan pusat Serbia menganggap referendum itu ilegal, hingga akhirnya terjadi perang antara kelompok etnis Albania yang menamakan diri Kosovo Liberation Army (KLA) melawan pasukan Serbia yang dengan kekuatan militer ingin mencegah Kosovo memisahkan diri. Serbia menerjunkan pasukannya ke wilayah Kosovo.⁷ Tentara-tentara serbia membunuh pejuang-pejuang kosovo dengan kejinya, hingga timbulah perlawanan-perlawanan dari rakyat kosovo. pertempuran terjadi dengan sangat sengit, Serbia berusaha untuk menghilangkan etnik Albania di kosovo.

Pertempuran yang keras menyebabkan terjadinya gelombang pengungsi dari Kosovo ke beberapa wilayah termasuk negara disekitarnya. Usaha penghapusan etnik yang dilakukan oleh Serbia memanggil PBB untuk terlibat dalam masalah tersebut dengan diadopsinya Resolusi 1224 (1999) pada 10 juni 1999,⁸ yang menetapkan provinsi Kosovo di bawah administrasi PBB dengan tugas membentuk pemerintahan sementara untuk Kosovo melalui tentara NATO untuk melakukan intervensi militer atas tentara Serbia di wilayah kosovo, Setelah

⁶ *Sejarah panjang kemerdekaan Kosovo*, (Akses pada tanggal 2 april 2008): Sumber <http://isnanto.multiply.com>.

⁷ *Sejarah panjang kemerdekaan Kosovo*, (Akses pada tanggal 21 april 2008): Sumber

terjadi kampanye pengeboman besar-besaran yang dilakukan tentara NATO akhirnya tentara Serbia terpaksa mundur dari Kosovo, disusul dengan program UN Mission In Kosovo (UNMIK) yang menjalankan administrasi pemerintahan dengan jaminan pengamanan dari tentara NATO.⁹

Pada pemilu bulan September 2007 yang sempat di boikot oleh etnik Serbia atas instruksi dari Beograd (pemerintah Serbia) mengonfirmasikan aspirasi kemerdekaan rakyat Kosovo. Pemerintahan Kosovo mengancam jika PBB tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Maka Kosovo akan mencari dukungan sepihak dari negara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang memang sudah terindikasi dukungannya. Setelah menanti cukup lama, Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 17 Februari 2008 lalu, dengan ditandatangani oleh Presiden Kosovo Fatmir Sejdiu, Perdana Menteri Hashim Thaci, serta juru bicara Parlemen Kosovo Jakup Krasniqi.¹⁰ Warga Kosovo memperjuangkan kemerdekaan dan melaksanakan hak-haknya di tanah air mereka sendiri dan membebaskan diri dari pendudukan Serbia yang telah dialami warga Kosovo dalam kurun waktu lama.

Kemerdekaan tersebut akhirnya mendapat dukungan dari negara-negara barat khususnya negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, di antaranya Inggris, Prancis, Belgia, Kroasia, Jerman, dan Italia. Di luar itu, Amerika Serikat juga mendukung deklarasi kemerdekaan Kosovo. Namun, yang paling mengejutkan adalah pengakuan secara tegas Pemerintah Australia. Negara ini

⁹ *Sejarah panjang kemerdekaan Kosovo*, (Akses pada tanggal 2 april 2008): Sumber <http://isnanto.multiply.com>.

menjadi negara pertama yang secara tegas menyatakan siap melakukan kerja sama diplomatik dengan Kosovo sebagai sesama negara yang merdeka.

Karena untuk berdirinya suatu negara harus ada dukungan atau syarat pengakuan dari negara lain, dalam bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang baru terbentuk maupun bantuan-bantuan dalam bentuk langsung berupa bantuan kemanusiaan maupun bantuan-bantuan untuk memeperkokoh Kosovo sebagai sebuah negara. Deklarasi Kosovo tentu tidak sepenuhnya mendapat dukungan oleh negara-negara UE. Beberapa negara Uni Eropa tidak mengakui eksistensi dari negara Kosovo yang memerdekakan diri dari Serbia. itumerupakan Tantangan terbesar bagi Kosovo yang ingin memerdekakan diri, berasal dari negara induknya yaitu Serbia yang menyatakan bahwa pendirian negara Kosovo di dalam wilayah nya merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan.

Pemimpin Serbia kemudian memberikan pernyataan, yang dikutip oleh media internasional, bahwa Serbia akan melakukan seluruh "tindakan diplomatik" untuk mencegah diakuinya Kosovo sebagai sebuah negara, khususnya terhadap usaha Kosovo untuk menjadi anggota dari PBB. Negara-negara lain yang menolak berdirinya negara Kosovo, pada umumnya merupakan negara yang mengalami masalah yang kurang lebih sama dengan Serbia, yaitu separatisme. Beberapa negara yang menolak independensi Kosovo adalah Rusia, Cina, Vietnam dan Spanyol.

Dalam konteks hukum internasional, pemisahan diri Kosovo menjadi menarik mengingat klaim yang diajukan Serbia dan kemungkinan pengakuan internasional bagi negara baru tersebut. Menurut Serbia, berdasarkan sejarahnya

Kosovo merupakan kawasan Serbia dan disana dulunya berdiri pusat pemerintahan Serbia. Namun karena diduduki Kekaisaran Otoman selama ratusan tahun maka wilayah tersebut ditinggalkan etnis Serbia yang mengungsi keluar dari wilayah pendudukan Otoman.¹¹ Pada saat itulah masuk etnis Albania yang mayoritas muslim dan tinggal di sana selama beratus-ratus tahun dan menjadi penduduk mayoritas di Kosovo.

Dengan klaim tersebut, Serbia menentang pemisahan Kosovo sebagai negara merdeka dan mendorong PBB serta berbagai negara di dunia untuk tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Menurut Serbia dengan mengakui Kosovo sebagai negara merdeka maka hal tersebut sama saja dengan mengesahkan 'pendudukan' etnis Albania terhadap wilayah yang secara historis merupakan bagian dari Serbia.

Kemerdekaan Kosovo yang diproklamasikan Minggu, 17 Februari 2008 mejadi menarik, karena membawa masalah tersendiri bagi Indonesia. pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo yang dideklarasikan secara sepihak itu memancing tanggapan berbeda-beda antara para pakar dan politisi di Indonesia. Hingga kini pemerintah belum memutuskan, apakah akan memberi pengakuan atas kemerdekaan Kosovo atau tidak? Masalah Kosovo mempunyai sejarah panjang, berdarah, dan amat kompleks. Proses menuju ke deklarasi kemerdekaan unilateral pun penuh kontrovers.

¹¹ *Konflik Kosovo dan Kekuatan Udara*, (akses pada tanggal 3 Maret 2008): Sumber <http://www.angkasaonline.com/09/10/opini/opini1.htm>.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas yaitu : Mengapa Indonesia mengambil sikap Diam dalam hal kemerdekaan Kosovo atas Serbia?

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori atau kerangka pemikiran untuk menjawab pokok permasalahan diatas adalah Politik Luar negeri. Diharapkan konsep ini dapat lebih memperjelas tentang kebijakan Luar Negeri Indonesia yang masih hati-hati dalam mengambil sikap dalam masalah kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008.¹² Menurut Eric Wilson, Teori Aktor Rasional adalah salah satu cara untuk menerangkan bagaimana kebijakan dalam politik internasional itu di putuskan atau dibuat melalui model aktor rasional digunakan untuk menganalisa kebijakan yang diambil oleh negara bangsa atau sebuah organisasi. Model ini dipakai sebagai landasan dalam investigasi atau meneliti individu bahwa individu yang terlibat adalah bersifat rasional. Dengan dasar ini seseorang dapat meneliti dan mendiskripsikan isu-isu serta kebijakan yang dibuat dalam politik internasional.

Dalam model aktor rasional politik luar negeri di pandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional terutama suatu pemerinatahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual prilaku pemerintah dianalogikan dengan p[erilaku dengan individu yang bernilai dan

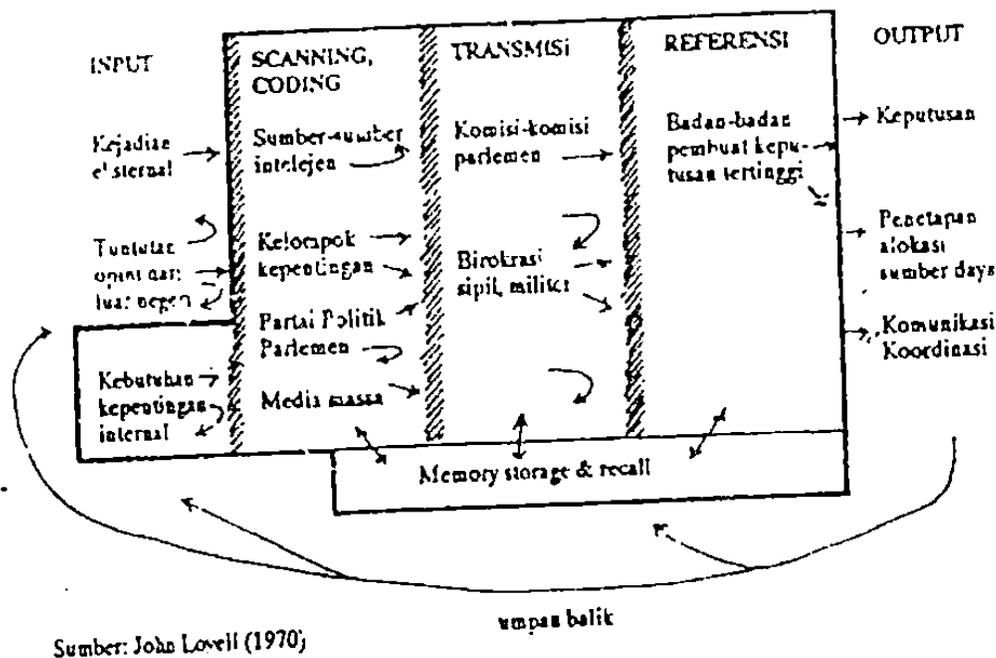
terkoordinasi. Unit analisis model pembuatan keputusan ini pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa. Alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan pemerintah untung rugi atas masing-masing alternatif itu.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan dalam kebijaksanaannya. Model ini paling sering digunakan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Kebijakan yang diambil atau politik luar negeri yang dilaksanakannya merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa tersebut yang pasti menguntungkan kepentingan nasionalnya. Aktor rasional sangat menentukan dalam terjalin tindakannya hubungan diplomatik suatu negara dalam perilaku aktor rasional adapat memprediksi suatu negara dengan negara lain¹³.

Proses Pembuatan Politik Luar Negeri Dalam Praktek Nyata

Menurut pendekatan sistem, proses pembuatan keputusan dalam suatu sistem politik bisa digambarkan dengan memegang Mesin Ideal Imajiner Pembuat Kebijakan (MIIPK) sebagai patokan, bagaimana sebenarnya dalam dunia nyata proses pembuatan keputusan politik luar negeri berlangsung? Hal ini

bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.¹⁴



a. Scanning

Scanning menggambarkan dalam MIIPK menggambarkan mekanisme seperti radar untuk menjalankan tugas terhadap lingkungan geopolitiknya, kita juga menemukan fungsi serupa dalam politik nyata, walaupun tidak sempurna seperti MIIPK. Jadi walaupun misalnya suatu fenomena yang terjadi di dunia bisa dideteksi atau dimasukkan kedalam sistem politik, jumlah informasi yang melewati jaringan komunikasi sistem itu begitu besar sehingga diluar jangkauan kemampuan manusia untuk menanganinya dengan baik.

¹⁴ John Lovell, *Man-Machine Information Processing: Theoretical Analysis and Technological Development*

b. Coding

Input kedalam sistem politik diinterpretasikan dan diklasifikasikan atau dipilah-pilah, yaitu di coded. Hambatan terhadap informasi yang bisa terjadi dalam proses Coding input politik luar negeri ditunjukkan di gambar atas oleh garis-patah-miring, yang berarti proses penyaringan input yang masuk, dan oleh panah-panah bengkok yang melambangkan distorsi atau penolakan informasi yang mau masuk. hal ini juga bisa berwujud missprespsi, yang bisa terjadi dari berbagai tahap proses pembuatan keputusan, mulai dari masuknya input sampai keluarnya keputusan. Politik luar negeri yang dibuat berdasar presepsi yang salah. tentu saja bis merugikan.

c. Transmisi

Informasi yang diterima dan di-coded dalam sistem polititk dikirmkan dari satu lokasi ke lokasi lain.proses ini sering harus melalui serangkaian tahap-tahap, dan di setiap tahap itu ada kemungkinan bahwa informasi itu hilang atau berubah. kemungkinan salah komunikasi kemacetan dalam jaringan komunikasi, hilangnya informasi dan distorsi informasi. Ini sangat besar tentang hambatan-hambatan yang datang dari factor psikologis manusia dan factor organisasi birokrasi. Garis miring ptah-patah itu menunjukkan proses penyaringan yang terjadi pada berbagai tahap penyaluran informasi dalam sistem politik.

d. Memory storage dan memory Recall

Kemampuan storage ini di gambarkan seperti penyimpanan memory dalam system politik tidak dilakukan pada satu lemabaga saja. Penyimpanan bisa berwujud bukan memory pribadi yang terlibat dalam proses politik luar negeri

memory kelompok atau memory seluruh masyarakat. Kelemahan dari storage ini sangat jelas, ingatan orang terbatas, begitu juga pengarsipan dan penyimpanan buku sering terjadi tidak menjamin akurasi penyimpanan. Lebih dari itu recall juga terbatas. Bagi Individu, me-recall memory yang disimpannya tidak selalu mudah.

e. Keputusan

Suatu keputusan adalah persoalan pilihan. Alternative selalu melibatkan, paling tidak, dua hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Suatu keputusan politik luar negeri penting hanya di buat setelah mempertimbangkan alternatif haluan tindakan. Dalam situasi pembuat keputusan tertentu, mereka terpaksa hanya mempertimbangkan beberapa dari banyak kemungkinan pilihan logis itu, dengan menghindarkan diri dari pembuat pilihan-pilihan yang bisa memaksa mereka untuk menilai kembali nilai-nilai tujuan dasar atau asumsi-asumsi operasionalnya. Juga, informasi vital yang bisa membuat para pembuat keputusan itu memperhatikan pilihan-pilihan yang dihindari itu mungkin tidak ada.

f. Implementasi Umpan Balik

Dalam kombinasi optimum keputusan dan implementasi, keberhasilan suatu kebijaksanaan tergantung pada penyataan yang cukup terhadap penerepan itu dan terhadap perubahan yang mungkin terjadi kemudian. Kaitan yang terjadi antara output suatu system dengan input berikutnya (termasuk pemantauan efek output terhadap lingkungan dan diteksi perubahan yang terjadi dalam

balik dari keputusan politik luar negeri ke input dari lingkungan di tunjukkan dalam gambar diatas oleh panah di bagian bawah.

Seperti dalam hal kasus Sikap Indonesia Terhadap Kemerdekaan Kosovo. Pemerintahan Indonesia dalam mengambil sikap memikirkan untung ruginya. Karena kemerdekaan warga Kosovo merupakan kemerdekaan yang tidak disetujui oleh negara induknya hal itu menimbulkan persepsi bahwa kemerdekaan tersebut merupakan suatu bentuk pemberontakan terhadap negara induknya yaitu Serbia atau dengan kata lain Separatisme. Disisi lain Pemerintahan Serbia yang dipimpin oleh Presiden Milosovic pada waktu itu melakukan pembantaian terhadap warga negara Kosovo dengan cara menurunkan militernya yang di komandoi langsung oleh presiden sehingga menewaskan ratusan warga Kosovo meninggal dunia.

Apabila pemerintah Indonesia menolak kemerdekaan Kosovo atas Serbia. Pertama, Indonesia sama saja tidak menghormati kemerdekaan negara lain. kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan yang tertuang dalam pembukaan UUD 45. Kedua, Indonesia akan mengabaikan keinginan sebagian besar rakyatnya sendiri yang menganut agama Islam terbesar di dunia mendukung kemerdekaan Kosovo yang juga masyarakatnya 90% muslim. Sehingga mempunyai keterikatan yang kuat secara psikologis yaitu persaudaraan yang mendukung pelepasan Kosovo atas penjajahan Serbia.

Melihat dari beberapa faktor di atas para aktor yang membuat keputusan

semuanya tidak ada yang menguntungkan secara signifikan dan kalau memilih salah satu dari keduanya Indonesia akan mendapatkan permasalahan baru yang kontroversi. Jadi, posisi Indonesia sangatlah dilematis diibaratkan naik geragaji alat pemotong kayu maju kena mundur kena. Dengan mengaitkan konsep yang digunakan dengan masalah yang terjadi, penulis akan mencoba menganalisa Sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Kosovo atas Serbia.

E. Hipotesa

Dari serangkaian latar belakang dan persoalan yang telah dijelaskan diatas dengan didukung oleh kerangka dasar pemikiran yang relevan, maka dapat ditarik hipotesa sebagai jawaban sementara Sikap diam Indonesia terhadap kemerdekaan Kosovo atas serbia. Sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untung rugi dalam mengambil kebijakan kemerdekaan Kosovo. Secara unilateral akan menimbulkan efek separatisme.
2. Indonesia mempertimbangkan hubungan kerjasama dengan Negara-negara yang sudah menjalin cukup lama baik dengan Negara-negara mendukung atau menolak kemerdekaan Kosovo.

F. Jangkauan Penelitian

Suatu batasan penelitian menjadi penting untuk dituliskan agar tujuan penulisan tidak melebar pada dimensi waktu yang lain. Penelitian yang diambil

1. Penelitian ini yaitu tentang sikap politik Indonesia terhadap kemerdekaan Kosovo.

kemerdekaannya pada bulan Februari 2008 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mengambil sikap pernyataan kemerdekaan Kosovo atas Serbia yang menimbulkan permasalahan sendiri yang cukup membingungkan bagi Negara Indonesia pada khususnya.

G. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :Mencoba menggambarkan tentang kemerdekaan Kosovo yang berdampak terhadap Politik -luar negeri Indonesia dalam mengambil keputusan terhadap kemerdekaan Kosovo. Penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan dan menjawab permasalahan yang ada. Bermanfaat bagi kepentingan penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Sosial dan Politik di Unversitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. yaitu dengan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian secara umum, kemudian dapat

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pendapat lain mengatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Pengumpulan data diperoleh dengan menggali studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak, internet, dan sumber-sumber lain yang dianggap masih relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang digunakan. Meskipun menganalisa dengan menggunakan data sekunder, penulis merasa yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenaran ilmiahnya.

I. Sistematika Penulisan

Bab. I: Pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, maksud dan tujuan penelitian, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II: Membahas tentang gambaran umum Sejarah Yugoslavia dan Serbia sampai terbentuknya Negara Kosovo. sejarah masuk Islam di kawasan Balkan dan

Serbia.

Bab. III: Membahas Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Secara Umum

Bab. IV: Membahas Sikap Indonesia Terhadap Kemerdekaan Kosovo dan membahas Hubungan Indonesia dengan negara-negara mendukung atau menolak kemerdekaan

Bab. V: Berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya